

KEPALA OMBUDSMAN KALBAR : KALAU ADA SISWA TITIPAN PPDB BISA DIPANTAU SETELAH DUA BULAN MASUK KELAS

Rabu, 23 Juni 2021 - Nessa Putri Andayu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Agus Priyadi menjelaskan bahwa sejauh ini telah dilakukan Sinergitas untuk mengawal pelaksanaan PPD Online untuk SMA/SMK Se-Kalbar.

Sinergitas tersebut dilakukan bersama oleh Ombudsman Provinsi Kalbar dengan Disdik Provinsi Kalbar, Dewan Pendidikan Satgas Saber Pungli yang telah menandatangani komitmen bersama beberapa waktu lalu.

"Apabila ada yang tidak sesuai aturan akan diberi sanksi maupun orang dinas, orangtua dan siswa. Saat ini kami sudah melakukan pemantauan secara *on the spot* mengambil sampling beberapa SMA/SMK," ujarnya, Senin 21 Juni 2021.

Dikatakannya memang di hari pertama ada sedikit permasalah dimana server down. Lalu berkaitan dengan siswa yang mengambil jalur Afrimasi tidak memiliki kartu KIP sebagai syarat daftar, akan tetapi memiliki buku KIP.

"Ada pendaftar yang ambil jalur Afrimasi tapi ada siswa yang hanya ada buku, tapi tidak ada kartu, begitu sebaliknya. Namun mereka tetap penerima KIP. Maka solusinya mereka diberikan surat keterangan dari SMP asal bahwa siswa tersebut adalah penerima KIP," jelasnya.

Sejauh dikatakannya belum ada laporan adanya siswa titipan. Lanjutnya menjelaskan bahwa hal tersebut biasanya baru bisa diketahui dua bulan setelah daftar ulang melalui absensi siswa.

"Kalau untuk sekarang belum ada laporan ke kami. Bagi masyarakat yang ingin komplek sesuai prosedur harus komplek ke panitia dulu," ujarnya.

Biasanya panitia secepatnya akan mengarahkan ke Dinas kalau terkait tentang teknis. Namun apabila tidak ada solusi bisa datang ke Ombudsman langsung. (*)

Sumber: Tribun Pontianak

Penulis: Anggita Putri
Editor: Hamdan Darsani